

**STUDI TEORI RELASI KEKUASAAN MICHEL  
FOUCAULT TERHADAP PENGGUNAAN TANAH KAS  
DESA UNTUK INDUSTRI ANTARA KERATON  
YOGYAKARTA DAN WARGA DESA SRIMULYO,  
PIYUNGAN, BANTUL**



**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Guna Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S. Ag) dalam Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam

Oleh:

**MUHAMMAD RIZKI YUSRIAL**

NIM. 19105010018

PEMBIMBING:

**Dr. ALIM ROSWANTORO, M.Ag.**

**NIP. 19681208 199803 1 002**

PROGRAM STUDI AQIDAH DAN FILSAFAT ISLAM FAKULTAS  
USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2023

# SURAT PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1189/Un.02/DU/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : STUDI TEORI RELASI KEKUASAAN MICHEL FOUCAULT TERHADAP PENGGUNAAN TANAH KAS DESA UNTUK INDUSTRI ANTARA KERATON YOGYAKARTA DAN WARGA DESA SRIMULYO, PIYUNGAN, BANTUL

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMMAD RIZKI YUSRIAL  
Nomor Induk Mahasiswa : 19105010018  
Telah diujikan pada : Kamis, 03 Agustus 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I  
Dr. Alim Roswanto, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 64d30490c59c6



Penguji II  
Dr. Imam Iqbal, S.Fil.I, M.S.I  
SIGNED

Valid ID: 64d1d1b081631



Penguji III  
Novian Widiadharna, S.Fil., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64d31eb9e1e41



Yogyakarta, 03 Agustus 2023  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.  
SIGNED

Valid ID: 64d58ec1671dc

# SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Rizki Yusrial  
NIM : 19105010018  
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Jurusan : Aqidah dan Filsafat Islam  
Alamat Rumah : Jalan Syekh Muh Said I, Desa Tangkit Baru, Muaro Jambi, Jambi  
Alamat Domisili : Jalan Waringin No. 58 Bantul  
Telp/HP : 0895604106561  
Judul : Studi Teori Relasi Kekuasaan Michel Foucault Terhadap Penggunaan Tanah Kas Desa untuk Industri Antara Keraton Yogyakarta dan Desa Srimulyo, Piyungan, Bantul

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar *asli* karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bila mana skripsi telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan, terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika ternyata lebih dari 2 (dua) bulan maka saya dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila dikemudian hari ternyata diketahui bahwa karya ini bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar sarjana saya.
4. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 28 Juli 2023

Saya yang menyatakan,



Muhammad Rizki Yusrial

NIM : 19105010018

## NOTA DINAS PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN  
KALIJAGA FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM  
Jln. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156, Fax. (0274) 512156 Yogyakarta  
55281

### SURAT KELAYAKAN SKRIPSI

Dosen : Dr. Alim Roswanto, M.Ag.  
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran  
Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal : Skripsi Sdr. Muhammad Rizki Yusrial  
Lamp. : -

Kepada  
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi, serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhammad Rizki Yusrial  
NIM : 19105010018  
Program Studi : Aqidah dan Filsafat Islam  
Judul Skripsi : Studi Teori Relasi Kekuasaan Michel Foucault Terhadap Penggunaan Tanah Kas Desa untuk Industri Antara Keraton Yogyakarta dan Desa Srimulyo, Piyungan, Bantul

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) dalam Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera *dimunaqosyahkan*. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 28 Juli 2023  
(Pembimbing)

**Dr. Alim Roswanto, M.Ag.**  
NIP. 19681208 199803 1 002

## ABSTRAK

Konflik antara Desa Srimulyo dan PT. YIP yang dioperasikan oleh PT. IGP hingga saat ini masih belum menemukan titik terang. Sejak masuk 2015 lalu, Pemerintah Desa kerap mengalami kerugian. Hal tersebut ditengarai oleh permasalahan sewa tanah yang belum dibayar dan juga dana lingkungan yang baru terealisasi delapan tahun semenjak PT itu berdiri, yaitu pada tahun 2023. Awal mula konflik ini adalah penunjukkan Desa Srimulyo sebagai desa industri. Hal itu terjadi pada tahun 2000 silam. Pemerintah Desa saat ini hanya mengeluarkan kebijakan untuk melanjutkan izin tersebut. Penunjukkan itu tentu sulit ditolak oleh warga. Sebab ada relasi kuasa kepemimpinan sultan dan permasalahan kepemilikan tanah Daerah Istimewa Yogyakarta yang berbeda dengan daerah lain.

Oleh karena itu, Menarik kiranya kekuasaan tersebut menjadi sebuah diskursus yang diangkat melalui tulisan. Penulis menganalisis penelitian ini menggunakan teori relasi kekuasaan Michel Foucault. Dasarnya adalah bahwa perkataan Foucault yang berbunyi jika arah politik dan kekuasaan tak hanya dilihat dari struktural tinggi ke bawah, tetapi bagaimana kekuasaan itu bisa berjalan. Tentu perkara penggunaan tanah yang berbeda dengan daerah lain ini, mengindikasikan ada wacana yang mempengaruhi regulasi pertanahan di DIY. Sehingga bisa dianalisis bagaimana bisa menurut UPA bahwa tanah tanpa kepemilikan adalah milik negara sementara DIY adalah milik Sultan Ground dan Pakualaman Ground. Selain itu, lebih spesifik di Desa Srimulyo, campur tangan keraton dalam masuknya PT.YIP serta proses penyelesaian sengketa lahan layak untuk diangkat menjadi sebuah karya ilmiah dengan metode penelitian kualitatif.

Hasil dari penelitian ini bahwa benar ada relasi kuasa DIY sebagai daerah dalam regulasi pertanahan. Desa Srimulyo menerima masuknya PT. YIP lewat jalur keraton dan izin kesultanan yang pada akhirnya banyak menimbulkan masalah. Relasi kekuasaan kembali terlihat saat proses sengketa berjalan. Tunggak sewa lahan yang harus dibayar oleh PT. YIP kepada Pemerintah Desa Srimulyo sesuai perjanjian awal berjumlah 8 miliar harus turun menjadi 2,9 miliar. Hal tersebut berdasarkan hasil audit Inspektorat DIY yang diperintahkan langsung oleh Sultan Hamengkubuwono X. Langkah tersebut diambil karena sultan tak ingin permasalahan ini masuk ke meja hijau. Dengan berat hati warga desa menerima hal tersebut. Dalam hal ini Foucault mengakui bahwa ada kekuasaan dari atas. Dalam hal ini pengetahuan yang dimiliki masyarakat sebagai sebuah etnik atas hasil penelitian arkeologi untuk melegitimasi kekuasaan. DIY sendiri memiliki sejarah pemerintahan monarki absolut yang sudah berlangsung selama berabad-abad. Akibatnya, ketaatan masyarakat terhadap keputusan sang saja dianggap sebagai bentuk pengetahuan.

**Kata kunci :** *Pertanahan, Keraton Yogyakarta, Relasi Kuasa, Michel Foucault, Desa Srimulyo*

## ABSTRACT

The conflict between Srimulyo Village and PT. YIP, operated by PT. IGP, has yet to find a resolution up to the present time. Since as far back as 2015, the village government has often experienced losses. This is attributed to unpaid land rent issues and the delayed realization of environmental funds, which only materialized eight years after the establishment of PT. YIP, in the year 2023. The initial source of this conflict was the designation of Srimulyo Village as an industrial village, a decision made in the year 2000. The current village government has only issued policies to extend that permit. Such a designation was difficult for the villagers to oppose, as it involves a power relationship between the Sultan's leadership and the unique land ownership situation in the Special Region of Yogyakarta, which differs from other regions.

Therefore, it is intriguing to elevate this exercise of power into a discourse through writing. The author analyzes this research using Michel Foucault's theory of power relations. The foundation lies in Foucault's notion that political direction and power should not only be viewed hierarchically from top to bottom, but also through understanding how power operates. The distinct land use in this area compared to other regions indicates the presence of discourses influencing land regulations in DIY. Thus, an analysis can be conducted on how, according to the UUPA (Basic Agrarian Law), land without ownership is considered state property, while in DIY, it is owned by the Sultan and Pakualaman Grounds. Moreover, in the specific context of Srimulyo Village, the involvement of the royal court in PT. YIP's entry and the land dispute resolution process warrants exploration as an academic work using qualitative research methods.

The research's findings reveal that there indeed exists a power relationship involving DIY as a region in land regulations. Srimulyo Village agreed to the entry of PT. YIP through the royal court's influence and the Sultanate's permission, which ultimately led to numerous issues. Power relations are evident again as the dispute process unfolds. The land rent owed by PT. YIP to the Srimulyo Village Government, initially set at 8 billion, was reduced to 2.9 billion. This adjustment was based on an audit conducted by the DIY Inspectorate, directly ordered by Sultan Hamengkubuwono X. This step was taken to avoid escalating the issue further. The villagers reluctantly accepted this decision. In this context, Foucault acknowledges the existence of power from above. Here, the knowledge possessed by the community as an ethnic group, based on the findings of archaeological research, serves to legitimize power. DIY itself has a history of absolute monarchy governance that spans centuries. Consequently, the community's obedience to the ruler's decisions constitutes a form of knowledge.

**Keyword:** *Land, Keraton Yogyakarta, Power Relations, Michel Foucault, Srimulyo Village*



**HALAMAN MOTTO**

*Setinggi apapun strata sosialmu di masyarakat, berpihaklah pada kaum yang tertindas.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Skripsi ini tentunya ku persembahkan untuk kedua orang tua yang senantiasa memberikan dukungan, baik secara moral maupun finansial. Hanya dengan menyelesaikan skripsi ini, orang tua saya yang tinggal di seberang pulau sana, punya alasan untuk menginjakkan kaki di Yogyakarta.*





## KATA PENGANTAR

Di tahun 2021, saya tidak sengaja membaca sebuah berita online yang diterbitkan oleh media Projectmultatuli.org. Cukup menggelitik, media itu memberi judul “Tanah Desa dalam Pusaran Bisnis dan Kuasa Keraton Yogyakarta”. Sebagai daerah yang punya sejarah kepemimpinan turun temurun, kekuasaan semacam ini bukanlah hal yang mengejutkan. Namun, di daerah demokrasi semacam Indonesia ini, perkara kekuasaan dalam bentuk apapun harus tetap mendapat pengawasan, termasuk soal tanah. Dengan begitu saat itu status saya yang masih menjadi mahasiswa semester lima menyimpan isu ini untuk dijadikan skripsi kelak.

Waktu berjalan, namun niat saya tidak berubah. Keraguan saya awalnya hanya terletak pada alamat KTP yang bukan berasal dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Tapi ini adalah karya ilmiah, kampus yang ideal adalah tempat berkumpulnya segala macam gagasan. Sah-sah saja rasanya bila menulis perkara kekuasaan yang monarki absolut ini untuk menjadi syarat mendapat gelar. Karena itu, niat tersebut tetap saya lanjutkan. Perkara nanti bakalan ditanya “*KTP-mu Ngendi?*” biarlah menjadi urusan belakangan. Di semester tujuh, niat itu saya administrasikan pada Program Studi dan *alhamdulillah* bisa saya selesaikan saat ini.

Jurusan Aqidah dan Filsafat Islam terdengar tidak nyambung bila membahas soal pertanahan. Ini memang harusnya makanan anak Fakultas Hukum dan Fakultas Pertanahan. Namun, keinginan yang begitu kuat membuat saya mendapat celah bahwa hal ini bisa diteliti lewat filsafat, pakai teori relasi kekuasaan Michel Foucault. Bagaimana kekuasaan di DIY bisa berjalan (dalam hal pertanahan) sementara sejatinya soal pertanahan ini sudah diatur pula lewat Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Hingga akhirnya keluarlah sebuah judul satu kalimat dengan lafadz “*Studi Teori Relasi Kekuasaan Michel Foucault Terhadap Penggunaan Tanah Kas Desa Untuk Industri Antara Keraton Yogyakarta Dan Desa Srimulyo, Piyungan, Bantul*”.

Dalam proses pengerjaan, saya beberapa kali kesulitan dalam mengumpulkan niat, cobaan mengerjakan skripsi benar-benar nyata saat itu. Hingga satu bulan pertama setelah seminar proposal di Januari 2023, saya belum

menyentuh skripsi sama sekali. Belum lagi saya juga beberapa kali aktif menulis di media online yang cukup menguras pikiran dan tenaga, tentu saja hal itu menyita waktu saya untuk mengerjakan skripsi. Kini, masa-masa itu hanya tinggal cerita, saya Muhammad Rizki Yusrial akhirnya bisa menyelesaikan skripsi ini meski terseok-seok. Hal tersebut tentu tidak lepas dari arahan dan bimbingan yang saya terima, terutama dari Pak Dr. Alim Roswanto selaku pembimbing skripsi saya. Selain itu, atas naskah yang sudah saya kerjakan dengan sebaik-baiknya dan se hormat-hormatnya ini, saya hendak menyampaikan terimakasih yang teramat dalam kepada beberapa pihak antara lain:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A., selaku rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Ibu Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A. selaku dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Muh Fatkhan, S.Ag , M.Hum. dan Bapak Novian Widiadharma, S.Fil., M.Hum selaku Kaprodi dan Sekprodi Aqidah dan Filsafat Islam.
4. Kedua orang tua saya, Bapak M. Yusuf dan Ibu Nurlian yang selalu mendukung saya secara moral maupun finansial, Sebagai anak tunggal, saya persembahkan gelar ini semata-mata untuk bapak dan ibu. Terima kasih atas kepercayaan yang telah diberikan. Membiarkan anak semata wayangnya ini merantau keluar pulau adalah kesempatan dan pengalaman yang teramat berharga bagi hidup saya.
5. Bapak Dr. Alim Roswanto, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Pembimbing Skripsi, Beliau telah rela mengeluarkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan atas skripsi ini.
6. Segenap Dosen Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dengan segenap kerendahan hati saya mengucapkan terimakasih atas ilmu yang telah diberikan selama proses pembelajaran.
7. Staf Pemerintah Desa Srimulyo dan Dukuh Cikal yang bersedia membantu saya dan bersedia diwawancarai sehingga saya mampu menyelesaikan skripsi ini.

8. Kawan-kawan kontrakan waringin yang sudah menjadi bagian hidup saya (Rizkita, Hizmil, Dayat, Faridl, Mas Udin, Thoriq dan Amin) selama dua tahun belakangan. Atas kehadiran teman-teman sekalian, saya mendapatkan semangat untuk bangkit dari kasur dan bergerak menyelesaikan studi
9. Segenap kawan Aqidah dan Filsafat Islam angkatan 2019 yang telah berjuang bersama semenjak menjadi mahasiswa baru hingga akhirnya dari kita bergelut dengan tuntutan kehidupan masing-masing.
10. Segenap keluarga besar Lembaga Pers Mahasiswa Rhetor (LPM Rhetor) yang telah bersedia menjadi naungan bagi saya dalam berorganisasi. Bersama teman-teman Rhetor, saya banyak belajar soal kepenulisan dan kekeluargaan. Dukungan dari teman-teman sangat membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Saya sangat menyadari bahwa tulisan ini penuh kekurangan. Karena itu, tentu saya bersedia menerima segala macam masukan dan koreksi dari para pembaca. Selain itu saya juga berharap bahwa skripsi ini punya manfaat bagi dunia akademik atau paling tidak sebagai bahan pengetahuan untuk penulis sendiri.

Yogyakarta, 26 Juli 2023

Penulis,



Muhammad Rizki Yusrial

NIM. 19105010018

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL.....</b>  | <b>i</b>    |
| <b>SURAT PENGESAHAN.....</b>   | <b>ii</b>   |
| <b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>  | <b>iii</b>  |
| <b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>  | <b>iv</b>   |
| <b>ABSTRAK.....</b>  | <b>v</b>    |
| <b>HALAMAN MOTTO.....</b>  | <b>vii</b>  |
| <b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>  | <b>viii</b> |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>   | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>   | <b>xii</b>  |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>  | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang.....   | 1           |
| B. Rumusan Masalah.....  | 5           |
| C. Tujuan Penelitian.....  | 5           |
| D. Manfaat Penelitian.....   | 5           |
| E. Kajian Pustaka.....   | 6           |
| F. Kerangka Teori.....   | 9           |
| G. Metode Penelitian.....  | 10          |
| H. Sistematika Penulisan.....  | 12          |
| <b>BAB II RELASI KEKUASAAN DALAM PEMIKIRAN MICHEL<br/>FOUCAULT.....</b>                            | <b>13</b>   |
| A. Kehidupan Michel Foucault.....  | 13          |
| B. Gagasan Penting Penopang Teori Relasi Kekuasaan.....  | 15          |
| C. Teori Relasi Kekuasaan.....   | 22          |
| <b>BAB III DESKRIPSI UMUM KEKUASAAN KERATON<br/>YOGYAKARTA ATAS PENGGUNAAN TANAH KAS DESA.....</b> | <b>31</b>   |
| A. Tanah Kas Desa dalam Perkembangannya.....   | 31          |
| 1. Masa Kolonial.....  | 31          |
| a. Kerajaan Mataram Islam.....   | 31          |
| b. Perjanjian Giyanti.....   | 34          |

|   |           |
|---|-----------|
| 2. Masa Perjuangan Kemerdekaan.....   | 36        |
| 3. Pasca Kemerdekaan .....  | 40        |
| 4. Lahirnya Undang-Undang Keistimewaan di Masa Reformasi .....  | 44        |
| B. Tanah Kas Desa.....  | 47        |
| <b>BAB IV KASUS PENGGUNAAN TANAH KAS DESA ANTARA<br/>KERATON YOGYAKARTA DAN DESA SRIMULYO DALAM<br/>TINJAUAN RELASI KEKUASAAN MICHEL FOUCAULT .....</b> | <b>51</b> |
| A. Gambaran Umum Desa Srimulyo .....  | 51        |
| B. Awal Penunjukan Desa Srimulyo Sebagai Desa Industri dan<br>Masuknya PT. YIP .....  | 52        |
| C. Permasalahan yang Muncul Beserta Penyelesaiannya .....   | 55        |
| 1. Masalah PT. YIP dengan Pemerintah Kalurahan Srimulyo.....  | 55        |
| 2. Upaya Penyelesaian .....   | 56        |
| D. Analisis Relasi Kekuasaan .....  | 58        |
| 1. Relasi Kekuasaan dalam Penunjukkan Srimulyo Sebagai Desa<br>Industri.....  | 58        |
| 2. Relasi Kekuasaan dalam Polemik Penyewaan Tanah Kas untuk<br>Industri, antara Pemerintah Desa Srimulyo, PT.YIP dan Keraton<br>Yogyakarta.....         | 63        |
| a. <i>Sovereign Power</i> , Resistensi Pemerintah Desa dalam<br>Persoalan Sewa Tanah.....   | 63        |
| b. Kuasa dalam Tubuh PT. YIP.....   | 65        |
| c. Analisis ‘ <i>Govermentality</i> ’ pada Tubuh Keraton Yogyakarta<br>dalam Menyelesaikan Permasalahan PT. YIP dengan<br>Pemerintah Desa Srimulyo..... | 68        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>  | <b>74</b> |
| A. Kesimpulan.....  | 74        |
| B. Saran .....  | 75        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>76</b> |
| <b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>   | <b>80</b> |
| <b>RIWAYAT HIDUP PENULIS .....</b>  | <b>83</b> |

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tanah kas desa merupakan bagian lahan yang digunakan untuk kepentingan ekonomi. Operasionalnya dijalankan oleh pemerintah desa sebagai pendapatan asli atau bisa juga dialihkan untuk kepentingan sosial. Hal tersebut berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Terbitnya undang-undang itu sekaligus memberikan nafas segar bagi masyarakat desa. bersama pemerintah desa, mereka diberikan keleluasaan dalam hal penggunaan dan pemanfaatan terhadap aset tersebut. Selain itu, siasat penggunaan tanah juga sebagai pemenuhan kepentingan masyarakat setempat dan berperan dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang tertuang pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Secara umum, tanah kas tersebut biasanya dikelola sendiri baik untuk pertanian maupun non pertanian. Di ranah pertanian, masyarakat menanam apa pun yang dapat tumbuh dan produktif sehingga mampu menunjang kesejahteraan sosial. Sementara bila tidak digunakan secara mandiri oleh desa, biasanya pemanfaatan tanah tersebut disewakan kepada individu ataupun kepentingan industrial. Bila pemanfaatan berjalan kurang maksimal, ini akan menjadi beban bagi anggaran belanja desa. Selain habis pada pengelolaan pemeliharaan tanah, pajak tanah tersebut juga terus-terusan harus dibayar.<sup>1</sup>

Di daerah Istimewa Yogyakarta, tanah kas desa dan pemanfaatannya itu diatur dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017. Pada pasal 1 ayat (1) menjelaskan definisi tentang tanah kas desa yang berbunyi:

---

<sup>1</sup> Elsa Pebriani Sinaga and Tri Daya Rini, “Pelemahan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pemanfaatan dan Pengembangan Tanah Kas Desa (Studi Kasus di Kalurahan Srimulyo, Kapenewon Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)”, *Governabilitas (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, vol. 3, no. 2 (2022), p. 133.

“Tanah desa adalah tanah yang asal-usulnya dari Kasultanan dan/atau Kadipaten yang dikelola oleh Pemerintah Desa berdasarkan hak anggaduh, yang jenisnya terdiri dari Tanah Kas Desa, Pelangguh, Pengarem-Arem, dan tanah untuk kepentingan umum”.

Hal ini sekaligus memberikan pandangan bahwa tanah yang digunakan tersebut adalah milik kesultanan, sehingga sultan dalam hal ini yang sekaligus menjabat sebagai Gubernur DIY punya kuasa lebih terhadap pemanfaatannya. UU No.6 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa tanah kas desa merupakan kekayaan milik desa. Bagi pemerintah dan pemerintah daerah dapat menghibahkan kepemilikannya kepada Desa. Namun, pada praktiknya di Yogyakarta, tanah yang sebelumnya atas nama kepunyaan negara berubah menjadi kepunyaan kadipaten atau kesultanan. Sehingga, bisa saja tanah yang digunakan masyarakat sebagai lahan produktif pertanian atau non pertanian itu, sewaktu-waktu diambil alih oleh sultan.

Kuasa lebih tersebut bisa dilihat pada Desa Srimulyo, Kapanewon (Kecamatan) Piyungan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pemerintah desa sejak awal menolak untuk menjadikan desa Srimulyo sebagai kawasan industri. Namun, desa terluas di Kabupaten Bantul tersebut dengan luas 1.456,7585 Ha<sup>2</sup> terpaksa kehilangan kedaulatan dalam mengelola tanahnya setelah Sultan Hamengku Buwono X menghendaki kawasan industri DIY berdiri di sana. Karpet merah bagi pelaku usaha industri tersebut ditunjukkan lewat Izin Gubernur DIY No. 143/3440 tentang izin penggunaan tanah Desa Srimulyo dan Sitimulyo seluas 100 Ha lebih untuk kawasan industri. Dari 100 ha itu, 65,8 ha-nya adalah bagian untuk Desa Srimulyo. Pemerintah desa tidak bisa berbuat banyak, dari hasil liputan investigasi kolaborasi yang terdiri dari Project Multatuli, Suara.com, Kompas.com, Jaring.id dan Tirto.id mengatakan bahwa mereka hanya bisa pasrah dan mengkhawatirkan nasib kedepannya.

---

<sup>2</sup> Pemerintah Desa, *Profil Desa Srimulyo* (Agustus 2020), <https://srimulyo-bantul.desa.id/index.php/artikel/2020/8/9/profil-wilayah-desa>.

Tanah yang sebelumnya berguna bagi pertanian dan peternakan, tidak akan menjadi pamong kehidupan lagi bagi masyarakat desa.<sup>3</sup>

PT IGP (Indonesia Green Packaging) Internasional yang dikelola oleh PT Yogyakarta Isti Pratama (YIP) lah yang berperan sebagai penyewa tanah desa tersebut. Kedatangan PT YIP bermula pada tahun 2015. Mereka menyewa tanah desa Srimulyo untuk pengembangan kawasan industri yang dikenal dengan kawasan Industri Piyungan. Sebelum transaksi penyewaan tanah tersebut, dilakukan pertemuan yang dihadiri oleh perwakilan Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemda DIY dan keluarga keraton di Yogyakarta.<sup>4</sup> Menantu Sultan, Kanjeng Pangeran Haryo (KPH) Wironegoro merupakan orang yang terlibat dalam investasi pemanfaatan tanah kas desa tersebut. Keterlibatannya sudah bermula sejak tahun 2006, ia memberikan konsep pengembangan terkait penggunaan tanah kas itu menjadi kawasan industri kreatif seni dan budaya.

Namun, baru berjalan beberapa tahun, keberadaan PT ini sudah membawa masalah. Kerusakan lingkungan seperti polusi udara, kerusakan drainase dan juga kebisingan suara pabrik sangat mengganggu mobilitas warga. Berkali-kali pemerintah desa memprotes hal tersebut lewat surat. Namun, tetap tidak digubris oleh pihak PT. Akibatnya, pada tanggal 21 April 2021 masyarakat setempat memblokade jalan menggunakan tumpukan batu. Sehingga akses truk kontainer yang biasa mendistribusikan hasil produksi kerajinan tertahan di jalan besar. Selain sebagai bentuk meluapkan amarah, blokade tersebut juga sebagai teguran kepada pihak PT yang menunggak membayar uang sewa sepanjang tahun 2018-2020. Bila sesuai dengan perjanjian di tahun 2015 maka PT YIP wajib membayar sebesar 8 Miliar Rupiah. Perseteruan antara Pemdes Srimulyo dan PT YIP ini sudah menjadi

---

<sup>3</sup> Fajar Nugraha, *Tanah Desa dalam Pusaran Bisnis dan Kuasa Keraton Yogyakarta* (Project Multatuli, 2021), <https://projectmultatuli.org/tanah-desa-dalam-pusaran-bisnis-dan-kuasa-keraton-Yogyakarta/>.

<sup>4</sup> Tim Liputan Khusus Suara.com, *Penguasaan Tanah Desa di Yogyakarta: Dari Keraton hingga Investor* (Suara.com, 2021), <https://jogja.suara.com/read/2021/09/20/131500/penguasaan-tanah-desa-di-Yogyakarta-dari-keraton-hingga-investor>.



perhatian sultan. Hasil Audiensi antara kedua belah pihak yang ditengahi oleh sultan adalah PT YIP wajib membayar uang sewa tapi dengan nominal yang turun signifikan. Dari yang seharusnya 8 Miliar Rupiah menjadi 2,8 Miliar Rupiah. Keputusan tersebut akhirnya diterima oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Praktik yang terjadi di Desa Srimulyo ini sekaligus mengantarkan saya untuk menulis realitas sosial yang terjadi dengan membenturkan teori yang dipopulerkan oleh Michel Foucault. Filsuf barat kontemporer tersebut terkenal dengan teori relasi kuasa yang ia bawa. Tentang kekuasaan, menurut Foucault kita tidak akan bisa lepas darinya.<sup>5</sup> Sebab setiap manusia akan mengalami sistem dominasi global, di mana satu kelompok menguasai kelompok lain, dan ketika sistem ini disalurkan secara berurutan, hal itu berdampak pada masyarakat secara keseluruhan. Kekuasaan akan terus bersirkulasi dalam sebuah jaringan hubungan di mana kita semua akan terjerat.<sup>6</sup> Namun, pada tulisan ini pertanyaan yang muncul bukanlah tentang apa itu kekuasaan, siapa yang memiliki kekuasaan, atau bagaimana kekuasaan itu bersumber. Melainkan bagaimana cara kekuasaan itu berjalan dan dengan cara apa mengoperasikan sebuah kekuasaan<sup>7</sup>. Dari ungkapan Foucault yang mengatakan bahwa kita adalah bagian dari kekuasaan, ia ingin kita semua menyadari bagaimana peran kita dalam peta kekuasaan tersebut. Butanya manusia terhadap peta itu akan melahirkan tindakan yang menindas dan menyeragamkan. Itulah yang terjadi pada praktik Desa Srimulyo ini. Bagi mereka yang menyadari, mekanisme kekuasaan yang lahir tentu akan berimplikasi baik kepada orang lain. Syarat akan nilai-nilai kemanusiaan demi mendahulukan kepentingan orang lain. Terlebih apabila hal ini dilakukan oleh birokrasi pemegang kekuasaan setempat.

---

<sup>5</sup> Michel Foucault, *Power/ knowledge : wacana kuasa/pengetahuan* (Yogyakarta: Bentang Budaya, 2002), p. 175.

<sup>6</sup> Black Hawk Hancock, "Michel Foucault and the Problematics of Power: Theorizing DTCA and Medicalized Subjectivity", *The Journal of Medicine and Philosophy: A Forum for Bioethics and Philosophy of Medicine*, vol. 43, no. 4 (2018), p. 452.

<sup>7</sup> Umar Kamahi, "Teori Kekuasaan Michael Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik", *Journal UIN Alauddin Makassar*, vol. Vol. 3 No.3 (2017), p. 119.

Atas latar belakang ini, maka saya ingin melakukan penelitian dengan judul “Studi Teori Relasi Kekuasaan Michel Foucault Terhadap Penggunaan Tanah Kas Desa Untuk Industri Antara Keraton Yogyakarta Dan Desa Srimulyo, Piyungan, Bantul”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang tersebut, maka dapat dibuat suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kasus Keraton Yogyakarta dan warga Desa Srimulyo terkait penggunaan tanah kas untuk usaha industri kerajinan, mebel, dan pengemasan oleh PT IGP Internasional yang dikelola oleh PT YIP
2. Bagaimana kasus tersebut jika dianalisis dari teori relasi kekuasaan Michel Foucault?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat ditentukan tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana kuasa Keraton Yogyakarta dalam menggunakan tanah kas Desa Srimulyo untuk menjadikan sebagai kawasan Industri
2. Untuk memahami bagaimana konsep relasi kuasa yang dipopulerkan oleh Michel Foucault dalam merespon polemik penggunaan tanah kas desa di Desa srimulyo.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana relasi kuasa Keraton Yogyakarta dalam menggunakan tanah kas Desa Srimulyo.
  - b. Sebagai bahan informasi kepada pembaca bagaimana konsep berpolitik dan kuasa menurut Foucault.

## 2. Manfaat Praktis

Sebagai Syarat untuk meraih gelar sarjana di Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hasil riset ini diharapkan menjadi bahan evaluasi agar terjalin relasi yang lebih baik antara keraton dan warga desa dalam pemerintahan masyarakat modern.

## E. Kajian Pustaka

Dalam penelitian yang bagus, menarik dan komprehensif, kajian pustaka merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan. Berisi tentang penelitian-penelitian sebelumnya untuk memberi gambaran kepada peneliti mau kemana arah penelitian ini akan dibawa. Untuk itu saya akan melampirkan beberapa penelitian yang mempunyai kesamaan dengan penelitian saya ini, baik dalam objek formal, objek material maupun konteksnya. Berikut penelitian tersebut.

*Pertama*, skripsi milik Aditya Bagus Nurul Huda dengan judul “Labuhan Parangkusumo sebagai Implementasi Praktik Politik Keagamaan Kesultanan Yogyakarta Perspektif Konsep Kuasa Michel Foucault” penelitian ini berisi tentang bagaimana praktik keagamaan yang sudah eksis secara kultural dinilai dari perspektif Michel Foucault. Meski ada beberapa yang menentang Aditya menganggap bahwa mereka yang menentang tidak paham dengan apa makna dan tujuan dari upacara Labuhan Parangkusumo ini. Karena itu, di sinilah relasi kuasa terjadi. Penentangan tersebut tidak menjadi suatu soal bila kesultanan tetap menginginkan tradisi tersebut dijalankan. Selanjutnya Aditya juga menganggap bahwa kuasa itu bukanlah milik melainkan strategi. Dalam praktik budaya ini bisa didapatkan bagaimana abdi dalem maupun sultan punya peran dan tugas masing-masing yang sama pentingnya.<sup>8</sup> Penelitian ini memiliki objek

---

<sup>8</sup> Aditya Bagus Nurul Huda, “Labuhan Parangkusumo Sebagai Implementasi Praktik Politik Keagamaan Kesultanan Yogyakarta Perspektif Konsep Kuasa Michel Foucault” (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/48723/>.

formal yang sama dengan yang akan saya angkat, yaitu sama-sama membahas tentang relasi kuasa Michel Foucault. Kesamaan lain adalah pembahasan tentang kuasa yang terjadi di Keraton Yogyakarta.

*Kedua*, Skripsi yang ditulis oleh Fredelis Irro Katia dengan judul “Otoritas Kesultanan Yogyakarta dalam Mempengaruhi Sistem Pemerintahan DIY (Studi Deskriptif Kualitatif di Keraton Yogyakarta)”. Penelitian ini membahas tentang keistimewaan DIY dalam mengatur pemerintahan dengan sumber hukum Undang-Undang nomor 3 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah istimewa Yogyakarta. Jelas bahwa hanya Yogyakarta provinsi yang gubernurnya tidak dipilih secara langsung oleh rakyat, melainkan langsung diisi oleh kesultanan keraton yang menjabat saat itu. Saat ini DIY dikepalai oleh Sultan Hamengku Buwono X dan Sri Paku Alam sebagai wakil kepala daerah. Acuan hukum yang lebih tinggi dari dasar hukum yang disebutkan adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 pada pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18B.<sup>9</sup> Penelitian ini akan bersinggungan dengan penelitian saya karena bagaimana menilai kekuasaan seorang kepala daerah yang tidak dipilih oleh rakyat dalam melaksanakan pemerintahan.

*Ketiga*, Penelitian Rangga Alfiantri Hasim yang berjudul “Politik Hukum Pengaturan Sultan Ground dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2013 Tentang keistimewaan Yogyakarta dan Hukum Tanah Nasional”. Penelitian ini berisi tentang analisis kewenangan Yogyakarta dalam penggunaan tanah menggunakan hukum nasional. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar penetapan kebijakan yang diambil dalam sejalan secara yuridis dan sinkron terkait pada pengaturannya. Penelitian ini juga berisi tentang perjalanan regulasi terkait kuasa penggunaan tanah yang dilakukan oleh keraton dari masa sebelum penjajahan hingga zaman merdeka seperti sekarang ini. Hasil dari penelitian ini adalah Sultan Yogyakarta punya hak kepemilikan tanah yang berbeda dengan

---

<sup>9</sup> Fredelis Irro Katia, “Otoritas Kesultanan Yogyakarta dalam Mempengaruhi Sistem Pemerintahan DIY (Studi Deskriptif Kualitatif di Keraton Yogyakarta)” (Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa Yogyakarta, 2016), <http://repo.apmd.ac.id/93/>.

kepemilikan individu rakyat Yogyakarta.<sup>10</sup> Penelitian ini akan menjadi gambaran bagaimana Pemerintah Desa Srimulyo tidak punya kedaulatan ketika sultan hendak menjadikan kawasan industri di tanah mereka.

*Keempat*, penelitian Elsa Pebriani Sinaga dan Tri Daya Rini dengan judul “Pelemahan Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pemanfaatan dan Pengembangan Tanah Kas Desa (Studi Kasus di Kalurahan Srimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)”. Secara substansial, tulisan ini memuat tentang kebijakan pemerintah DIY yang membuat Pemerintah Desa/Kalurahan terbatas kedaulatannya dalam mengoperasikan pemanfaatan tanah kas Desa. Penelitian ini juga mengangkat masalah yang ada di Desa Srimulyo. Dalam akhir tulisannya, adalah peneliti membuktikan indikasi kebijakan pemerintah DIY dalam melumpuhkan kewenangan Kalurahan Srimulyo dalam mengembangkan dan memanfaatkan tanah kas desa mereka sendiri. Sehingga yang terjadi adalah pengelolaannya yang tidak optimal karena tidak memberi nilai tambah ekonomi bagi lurah dan perangkat kelurahan.<sup>11</sup>

*Kelima*, Tesis milik Muhammad Andy Kurniawan, SH. dengan judul “Implikasi Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Status Kepemilikan Tanah Sultan Ground”. Penelitian ini membahas tentang pengaturan tanah Sultan Ground sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2014 sehingga belum ada Peraturan daerah istimewa yang terbit membahas tentang itu. Sehingga secara regulasi, kewenangan dalam hal pengelolaan dan pemanfaatan tanah kas desa yang dalam undang-undang menjadi milik kesultanan dan kadipaten dikuasai oleh

---

<sup>10</sup> Rangga Hasim, “Politik Hukum Pengaturan Sultan Ground dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 Tentang Keistimewaan Yogyakarta dan Hukum Tanah Nasional”, *Arena Hukum*, vol. 9, no. 2 (2016), pp. 207–24.

<sup>11</sup> Sinaga and Rini, “Pelemahan Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Dan Pengembangan Tanah Kas Desa (Studi Kasus di Kalurahan Srimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)”.

sultan. Warga hanya memiliki hak guna bangunan.<sup>12</sup> Penelitian ini sebagai acuan yuridis bagi saya karena membahas tentang tanah kas desa.

*Keenam*, Penelitian yang ditulis oleh Konrad Kebung dengan judul “Membaca Kuasa Michel Foucault dalam Konteks Kekuasaan di Indonesia”. Penelitian ini mengkaji bagaimana individu-individu khususnya di Indonesia menghadapi peristiwa-peristiwa sejarah dalam berbagai pemikiran, cara hidup dan budaya lewat pemikiran Michel Foucault. Meskipun menilik dari peristiwa sejarah, tulisan ini adalah sebagai bahan yang bisa direfleksikan di masa kini. Dalam penelitian ini mengambil kesimpulan bahwa Foucault tampak terlalu tidak realistis dan tidak mungkin pemikirannya tentang kekuasaan bisa diterapkan di Indonesia. Namun, bila pemimpin Indonesia mau berusaha berfikir untuk bertindak dengan teori relasi kekuasaan Foucault, setidaknya membuka sedikit kesempatan untuk lebih dewasa atau paling tidak Indonesia berusaha membuat wilayahnya bebas dari penindasan dan dominasi.<sup>13</sup> Penelitian ini merupakan penelitian objek formal yang akan saya jalankan.

## **F. Kerangka Teori**

Penelitian ini akan membawa teori Relasi Kuasa milik Michel Foucault. Foucault berpendapat bahwa tidak ada satupun masyarakat di dunia ini yang bisa terlepas dari kekuasaan. Hal ini mengindikasikan bahwa relasi kuasa akan terus ada hadir dalam situasi dan kondisi apapun. Jadi anggapan tentang bahwa kuasa harus dikaitkan kepada mereka yang memiliki kekuasaan, pemegang jabatan atau dikaitkan dengan lembaga tertentu, khususnya aparat negara bagi Foucault, tidaklah salah, tapi juga tidak tepat. karena kuasa ada dimana-

---

<sup>12</sup> Muhammad Andy Kurniawan, SH, “Implikasi Berlakunya Undang-Lndang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Status Kepemilikan Tanah Sultan Ground” (Universitas Islam Indonesia, 2014), <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/8767>.

<sup>13</sup> Konrad Kebung, “Membaca ‘Kuasa’ Michel Foucault dalam Konteks ‘Kekuasaan’ di Indonesia”, *MELINTAS*, vol. 33, no. 1 (2018), pp. 34–51.

mana.<sup>14</sup> Foucault juga berpendapat bahwa kekuasaan adalah relasi yang bersifat produktif, sehingga kita seharusnya tidak mendeskripsikan efek-efek kekuasaan dalam istilah yang negatif. Seperti kekuasaan itu mengucilkan, menyensor, mengabstraksikan, menutupi, atau menekan subyek yang didominasi.<sup>15</sup> Namun, ketika kita lupa menyadari posisi kita dalam peta kekuasaan, justru hal tersebut yang dapat menyebabkan penindasan dan penyeragaman.

Bahasa kekuasaan adalah bahasa hukum, bukan sihir, agama atau apapun sehingga banyak yang melihat bahwa kekuasaan adalah hubungan dari atas ke bawah. Sementara Foucault beranggapan bahwa dalam relasi kuasa juga ada gerakan dari bawah ke atas pada waktu yang bersamaan. Sehingga seorang budak sekalipun berperan dalam relasi kuasa dengan tuannya. Selanjutnya Foucault menganggap bahwa kekuasaan adalah strategi yaitu dimana praktik dalam ruang lingkup di mana ada banyak posisi yang secara strategis berkaitan satu sama lain dan senantiasa mengalami pergeseran. Karena itu ia menganggap bahwa strategi bukan hanya bertugas untuk mempertahankan kekuasaan, melainkan menonjolkan, menstabilkan, dan memperluas dirinya sendiri. Seperti maneuver. Seorang psikiater harus melakukan manuver akan diakui oleh publik bahwa diri adalah ahli kesehatan mental di daerah tersebut.<sup>16</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang mengambil sebuah permasalahan pertanahan di Desa Srimulyo untuk memahami sebuah fenomena apa yang terjadi dan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Dengan menggunakan analisis relasi kekuasaan Michel

---

<sup>14</sup> K. Bertens, *Filsafat Barat kontemporer*, [Rev. and expanded ed.] edition (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), p. 311.

<sup>15</sup> Barry Allen, "Government in Foucault", *Canadian Journal of Philosophy*, vol. 21, no. 4 (1991), p. 431.

<sup>16</sup> Foucault, *Power/ knowledge : wacana kuasa/pengetahuan*, p. 255.

Foucault dan dipadukan pada konsep “*going exploring*” yang melibatkan *In-depth and case-oriented study* diharapkan mempermudah penulis dalam memahami dan kalau memungkinkan menciptakan sebuah hipotesis baru.<sup>17</sup> Selain penelitian lapangan kajian literatur dengan menelusuri dan menelaah naskah-naskah yang berhubungan.

Penulis akan memberikan penjelasan teratur dan sistematis tentang suatu masalah sejauh yang sudah penulis dapatkan. Sejatinya, penelitian filsafat harus mampu memberikan evaluasi dalam hal yang ia teliti, mencari pemahaman baru terhadap modal pemikiran yang telah dikumpulkan. Karena itu, penelitian ini akan berupaya kembali menyajikan permasalahan-permasalahan yang bersifat mendasar agar bisa dijadikan pijakan.<sup>18</sup>

## 2. Pengumpulan Data

### a. Data Primer

Penelitian ini berasal dari beberapa sumber data utama. Sebagai rujukan awal, penulis mengambil pemberitaan investigasi yang dilakukan oleh Tirta.id, Project Multatuli, Suara.com dan Kompas.com dalam meliput isu agraria di DIY. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis dokumen-dokumen pendukung seperti surat keputusan Desa Srimulyo untuk bekerja sama dengan PT YIP. Kemudian, untuk memperkuat data, penulis memperoleh lewat berbagai interview mendalam sebagai kajian dalam memahami secara komprehensif bagaimana kasus ini bisa berjalan. Dikumpulkan selengkap dan *se-up-to-date* mungkin. Nantinya, semua data akan diuraikan mengenai kedudukan masalah; peristiwa-peristiwa atau situasi faktual dan reaksi-reaksi.

### b. Data Sekunder

---

<sup>17</sup> Anis Chairi, “Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif”, *E-Journal Undip* (2008), <http://eprints.undip.ac.id/577/>.

<sup>18</sup> Anton Bakker and Achmad Charris Zubair, *Metodologi penelitian filsafat*, Cet. 4 edition (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1994), pp. 16–7.



Data ini merupakan data yang siap digunakan dan dianalisa. Pemilihan data ini bertujuan untuk melengkapi sumber data primer. Jenis-jenis dari data tersebut antara lain, publikasi jurnbal, buku-buku yang berkaitan dengan pemikiran Michel Foucault, surat kabar cetak atau daring, dan data-data pendukung lainnya

## **H. Sistematika Penulisan**

Penelitian ini akan terbagi menjadi lima bab utama. BAB I (Pendahuluan) pada bab ini saya akan memaparkan latar belakang masalah sebagai alasan kenapa saya ingin melakukan penelitian ini. Disusul dengan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka dan kajian teori. Sebagai gambaran awal tentang penelitian yang akan saya lakukan.

BAB kedua adalah penjabaran teori, yang menjelaskan lebih komprehensif tentang konsep politik dan relasi kekuasaan yang diusung oleh Michel Foucault. Pada bab ini penggambaran konsep tersebut akan penulis jabarkan mulai dari bagaimana konsep itu hadir hingga pengaruhnya pada kondisi sosio-politik di Perancis pada masa itu.

BAB ketiga akan berisi tentang deskripsi umum kekuasaan keraton atas penggunaan tanah kas desa. Dari masa Kerajaan Mataram Islam dan Yogyakarta berdiri sebagai daerah istimewa Hingga terbitnya Pergub DIY No 34 tahun 2017.

BAB keempat adalah analisis yang berisi tentang hasil dari analisis mengenai praktik relasi kuasa Keraton Yogyakarta dalam penggunaan tanah kas Desa Srimulyo dengan menggunakan perspektif Michel Foucault.

BAB kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang saya lakukan. Selain itu juga berisi saran, dan daftar pustaka.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Meski dalam keadaan ragu, Pemerintah Desa Srimulyo saat ini mengeluarkan kebijakan sebagai tindak lanjut dari Izin gubernur tentang penunjukannya sebagai desa industri. Dalam perjalanannya, baru tahun 2015 ada investor masuk. Yaitu, PT YIP dengan menyewa lahan seluas 105 hektare. Masuknya PT ini tidak terlepas dari peran keraton Yogyakarta melalui persetujuan Kanjeng Pangeran Harjo (GPH) Wironegoro, menantu sultan hamengkubuwono X. Dalam perjalanannya, banyak sekali permasalahan yang muncul, mulai dari penyewaan lahan yang mengalami penunggakan hingga masalah lingkungan setelah industri itu berdiri. Pemerintah Desa dan warga kerap dibuat geram. Berkali-kali sudah melakukan teguran kepada pihak PT YIP lewat surat. Karena tidak digubris, Masyarakat melakukan tindakan memblokade jalan sebagai jalur masuk ke PT. Sejauh ini sudah tiga kali hal tersebut dilakukan. Sebagai dampaknya, APBDes Srimulyo menjadi sedikit kacau dan mobilitas warga sedikit terganggu karena persoalan lingkungan.

Konflik antara PT. YIP dan pemerintah desa Srimulyo ini memperlihatkan bagaimana kekuasaan sultan beroperasi secara tidak langsung melalui mediasi dan audit keuangan. Ketidak inginan sultan memasukkan kasus ini ke meja hijau membuat Pemerintah Srimulyo terpaksa terima hasil audit dari Inspektorat DIY yang mengatakan bahwa tunggakan milik PT. YIP hanya sebesar Rp2,9 miliar. Padahal, menurut catatan awal perjanjian. Keseluruhan harusnya berjumlah Rp8 miliar. Dalam hal ini Teori Foucault tentang “Governmentality” mengungkapkan bagaimana pemerintah beroperasi melalui prinsip-prinsip, praktik-praktik, dan gagasan yang mempengaruhi populasi sebagai targetnya. Kekuasaan ini mempengaruhi kebebasan individu, yang tidak hanya dilihat sebagai keterbatasan atau pembatasan, tetapi juga sebagai kontrol dan pengaturan kebebasan tersebut.

Ketaatan Pemdes Srimulyo terhadap Keputusan Inspektorat DIY yang langsung dipilih oleh Sultan, juga berasal dari hubungan kekuasaan yang bersifat relasional antara kedua entitas ini. Dinamika kekuasaan dari atas ke bawah juga diakui oleh Foucault. Foucault menekankan pentingnya manifestasi kekuasaan lokal atau mikro dalam konteks struktur kekuasaan hierarkis ini, serta peran pengetahuan dalam melegitimasi kekuasaan. DIY sendiri memiliki warisan sejarah pemerintahan monarki absolut selama berabad-abad. Akibatnya, ketaatan masyarakat terhadap keputusan saja dianggap sebagai bentuk pengetahuan. Meskipun tinggal di negara demokratis, masyarakat Srimulyo tidak dapat mengambil tindakan ketika temuan audit berdampak buruk pada mereka dan mengganggu APBDes. Dengan adanya kekuasaan seperti itu, banyak situasi yang tidak sesuai dengan kondisi masyarakat dianggap sebagai peluang penggunaan kekuasaan tersebut.

## **B. Saran**

Penelitian ini sebagai bentuk pemetaan masalah pertanahan yang ada di Desa Srimulyo dengan menggunakan analisis Relasi kekuasaan Michel Foucault. Diharapkan nantinya punya kontribusi sebagai bahan evaluasi penggunaan tanah kas desa yang lebih bermanfaat bagi banyak pihak. Belajar dari kasus ini, penunjukkan dan penyelesaian masalah pertanahan harus benar-benar melibatkan pemerintah desa dan warga. Selain itu, terjalin hubungan kekuasaan yang baik antara Keraton Yogyakarta dengan warga Desa di DIY terkhusus Desa Srimulyo.

Untuk Selanjutnya, masih banyak persoalan tanah di DIY ini yang patut untuk diangkat. Sebagai saran, peneliti selanjutnya bisa menganalisis bagaimana kekuasaan tanah kas desa antara pemerintah desa dengan warga desa itu sendiri. Sebab, sejauh yang saya pahami, tanah kas desa kebanyakan digunakan hanya untuk kesejahteraan perangkat desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhi, Irawan Sapto, *Wajah Keraton dalam PemanfaatanTanah di Yogyakarta (1)*, Yogyakarta: Kompas.com, 2021,  
<https://regional.kompas.com/read/2021/09/20/134726478/wajah-keraton-dalam-pemanfaatan-tanah-di-yogyakarta-1?page=all>.
- Allen, Barry, “Government in Foucault”, *Canadian Journal of Philosophy*, vol. 21, no. 4, 1991, pp. 421–39  
[\[https://doi.org/10.1080/00455091.1991.10717255\]](https://doi.org/10.1080/00455091.1991.10717255).
- Andy Kurniawan, SH, Muhammad, “Implikasi Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Status Kepemilikan Tanah Sultan Ground”, Universitas Islam Indonesia, 2014, <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/8767>.
- Anggraeni, Tyas Dian, “Interaksi Hukum Lokal Dan Hukum Nasional Dalam Urusan Pertanahan Di Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, vol. 1, no. 1, 2012, p. 53  
[\[https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i1.106\]](https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i1.106).
- Anwar, M. Hamid, *Relasi Kuasa Pengetahuan dalam Pendidikan Jasmani Sebuah Telaah Arkeo-Genealogi Michel Foucault*, Yogyakarta: UNY Press, 2020.
- Bagus Nurul Huda, Aditya, “Labuhan Parangkusumo Sebagai Implementasi Praktik Politik Keagamaan Kesultanan Yogyakarta Perspektif Konsep Kuasa Michel Foucault”, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/48723/>.
- Bakker, Anton and Achmad Charris Zubair, *Metodologi penelitian filsafat*, Cet. 4 edition, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1994.
- Bertens, K., *Filsafah Barat komtemporer*, [Rev. and expanded ed.] edition, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006.
- Biaya Sewa Lahan Tak Dibayarkan Sejak 2018*, Yogyakarta: Tribun Jogja, 2020.
- Boote, David N. and David W. Blades, “Procedures of Power and Curriculum Change: Foucault and the Quest for Possibilities in Science Education”, *Canadian Journal of Education / Revue canadienne de l'éducation*, vol. 23, no. 3, 1998, p. 352 [\[https://doi.org/10.2307/1585949\]](https://doi.org/10.2307/1585949).
- Budi Widyanta, Andreas, “From Grassroots Activism To Managerialism Kuasa NGOs Indonesia Paska Otoritarian dalam Pusaran Governmentalitas Neoliberal”, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2022.

- Chairi, Anis, “Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif”, *E-Journal Undip*, 2008.
- Desa, Pemerintah, *Profil Desa Srimulyo*, Agustus 2020, <https://srimulyo-bantul.desa.id/index.php/artikel/2020/8/9/profil-wilayah-desa>.
- DIY, Pemerintah, *Sejarah Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta: Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, 2017.
- Dwiyansany, Shenita and Lita Tyesta Addy Listiya Wardhani, “Sistem Pertanahan Keraton Yogyakarta Sebagai Daerah Otonomi Khusus”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 1, no. 2, 2019, pp. 226–36 [<https://doi.org/10.14710/jphi.v1i2.226-236>].
- Flohr, Mikkell, “Regicide and resistance: Foucault’s reconceptualization of power”, *Distinktion: Journal of Social Theory*, vol. 17, no. 1, 2016, pp. 38–56 [<https://doi.org/10.1080/1600910X.2016.1145590>].
- Folkers, Andreas, “After *virtù* and *fortuna* : Foucault on the government of economic events”, *Distinktion: Journal of Social Theory*, vol. 15, no. 1, 2014, pp. 88–104 [<https://doi.org/10.1080/1600910X.2013.779288>].
- Foucault, Michel, *The history of sexuality*, 1st Vintage Books ed edition, New York: Vintage Books, 1988.
- , *Seks dan kekuasaan: sejarah seksualitas*, Jakarta: Gramedia, 1997.
- , *Power/ knowledge : wacana kuasa/pengetahuan*, Yogyakarta: Benteng Budaya, 2002.
- Hancock, Black Hawk, “Michel Foucault and the Problematics of Power: Theorizing DTCA and Medicalized Subjectivity”, *The Journal of Medicine and Philosophy: A Forum for Bioethics and Philosophy of Medicine*, vol. 43, no. 4, 2018, pp. 439–68 [<https://doi.org/10.1093/jmp/jhy010>].
- Haryatmoko, *Membongkar Rezim Kepastian: Pemikiran Kritis Post-Strukturalis*, 11th edition, Yogyakarta: Kanisius, 2016.
- Hasim, Rangga, “Politik Hukum Pengaturan Sultan Ground Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2013 Tentang Keistimewaan Yogyakarta Dan Hukum Tanah Nasional”, *Arena Hukum*, vol. 9, no. 2, 2016, pp. 207–24 [<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00902.4>].
- Illiyan, Maulida, “Polemik Pertanahan Di Daerah Istimewa Yogyakarta: (Paska terbitnya Undang-Undang No 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan

- Daerah Istimewa Yogyakarta)", *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, vol. 22, no. 3, 2020 [<https://doi.org/10.14203/jmb.v22i3.1106>].
- Irro Katia, Fredelis, "Otoritas Kesultanan Yogyakarta dalam Mempengaruhi Sistem Pemerintahan DIY (Studi Deskriptif Kualitatif di Keraton Yogyakarta)", *Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa Yogyakarta*, 2016, <http://repo.apmd.ac.id/93/>.
- Iswantoro, Iswantoro, "Peranan Sri Sultan Hamengku Buwono IX dalam Menegakkan Kemerdekaan Negara Republik Indonesia", *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, vol. 3, no. 2, 2020, p. 158 [<https://doi.org/10.30829/juspi.v3i2.5601>].
- Kamahi, Umar, "Teori Kekuasaan Michael Foucault: Tantangan Bagi Sosiologi Politik", *Journal UIN Alauddin Makassar*, vol. Vol. 3 No.3 (2017), 2017, pp. 117–33.
- Kebung, Konrad, "Membaca 'Kuasa' Michel Foucault dalam Konteks 'Kekuasaan' di Indonesia", *MELINTAS*, vol. 33, no. 1, 2018, pp. 34–51 [<https://doi.org/10.26593/mel.v33i1.2953.34-51>].
- Khusus Suara.com, Tim Liputan, *Penguasaan Tanah Desa di Yogyakarta: Dari Keraton hingga Investor*, Suara.com, 2021, <https://jogja.suara.com/read/2021/09/20/131500/penguasaan-tanah-desa-di-Yogyakarta-dari-keraton-hingga-investor>.
- Komar, Faridi, "Dinamika Kerajaan Mataram Islam Pasca Perjanjian Giyanti Tahun 1755-1830", Universitas Jember, 2017.
- Lilja, Mona and Stellan Vinthagen, "Sovereign power, disciplinary power and biopower: resisting what power with what resistance?", *Journal of Political Power*, vol. 7, no. 1, 2014, pp. 107–26 [<https://doi.org/10.1080/2158379X.2014.889403>].
- McKinlay, Alan and Eric Pezet, "Foucault, governmentality, strategy: From the ear of the sovereign to the multitude", *Critical Perspectives on Accounting*, vol. 53, 2018, pp. 57–68 [<https://doi.org/10.1016/j.cpa.2017.03.005>].
- Munawar, Zaid, "Tanah, Otoritas Politik, dan Stabilitas Ekonomi Kerajaan Mataram Islam (1613-1645 M)", *Diakronika*, vol. 21, no. 1, 2021, pp. 1–13 [<https://doi.org/10.24036/diakronika/vol21-iss1/163>].
- Munslow, Alun, *Deconstructing history*, 2nd ed edition, New York NY: Routledge, 2006.

- Nugraha, Fajar, *Tanah Desa dalam Pusaran Bisnis dan Kuasa Keraton Yogyakarta*, Project Multatuli, 2021, <https://projectmultatuli.org/tanah-desa-dalam-pusaran-bisnis-dan-kuasa-keraton-Yogyakarta/>.
- Putra, Ramadhani Surya and Kumalasari Dyah, “Kraton Yogyakarta Tahun 1755-1816”, *RISALAH*, vol. Vol 5, No 1 (2018), 2018, pp. 75–83.
- Putsanra, Dipna Videlia, “Asal Usul Tanah Desa: dari Kepunyaan Negara jadi Milik Keraton”, *Tirto.id*, Yogyakarta, 22 Sep 2021, <https://tirto.id/asal-usul-tanah-desa-dari-kepunyaan-negara-jadi-milik-keraton-gjHZ>.
- Santoso, Agung Nugroho, “Pemanfaatan Tanah Kas Desa Setelah Berlakunya Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017 Di Kabupaten Sleman”, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018.
- Shaffer, Elinor, “*The History of Sexuality. Vol. 1: An Introduction* . Michel Foucault , Robert Hurley”, *Signs: Journal of Women in Culture and Society*, vol. 5, no. 4, 1980, pp. 812–20 [<https://doi.org/10.1086/493768>].
- Sinaga, Elsa Pebriani and Tri Daya Rini, “Pelemahan Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pemanfaatan Dan Pengembangan Tanah Kas Desa (Studi Kasus di Kalurahan Srimulyo, Kapenewon Piyungan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta)”, *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, vol. 3, no. 2, 2022, pp. 132–48 [<https://doi.org/10.47431/governabilitas.v3i2.215>].
- Susanto, Adi et al., *Biografi Tokoh-Tokoh Sosiologi Klasik sampai Postmodern*, Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Turkel, Gerald, “Michel Foucault: Law, Power, and Knowledge”, *Journal of Law and Society*, vol. 17, no. 2, 1990, p. 170 [<https://doi.org/10.2307/1410084>].
- Umar, Jaenudin, “Kewenangan Otonomi Daerah: Sistem Pertanahan Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia*, vol. 1, no. 2, 2021, pp. 114–9 [<https://doi.org/10.59141/cerdika.v1i2.27>].
- Videlia Putsanra, Dipna, *Silang Sengkarut Sewa Tanah Desa di Yogyakarta*, Indepth, Yogyakarta: Tirto.id, 2021.
- Wiradnyana, Ketut, *Michel Foucault, arkeologi pengetahuan dan pengetahuan arkeologi*, Cetakan pertama edition, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.